



Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan dan Kesehatan Pada Puskesmas Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sahade¹, Nafiatul Ahwalah², Masdar Ryketeng³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
sahade@unm.ac.id¹, 210901502012@gmail.com², masdar.ryketeng@unm.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan lima komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal pada Puskesmas Sailus belum berjalan secara optimal. Pada aspek lingkungan pengendalian, SOP telah diterapkan, namun masih terdapat perangkapan tugas yang mengurangi independensi. Pada penilaian risiko, puskesmas telah menerapkan sistem FEFO dan menentukan batas minimal stok, tetapi risiko kehilangan masih tinggi karena akses gudang yang tidak dibatasi. Aktivitas pengendalian sudah mencakup pencatatan manual, pengecekan stok bulanan, serta penyusunan LPLPO, namun belum didukung sistem digital yang memadai. Informasi dan komunikasi telah berlangsung melalui rapat rutin dan media digital, tetapi sistem informasi persediaan belum terintegrasi. Pemantauan dilakukan melalui stock opname dan audit eksternal, namun belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan persediaan. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal Puskesmas Sailus dinilai belum sepenuhnya efektif dan memerlukan perbaikan pada aspek akses gudang, digitalisasi pencatatan, serta pemisahan tugas. Beberapa kelemahan yang ditemukan meliputi akses gudang yang masih terbuka tanpa pembatasan yang memadai, pencatatan stok yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta adanya perangkapan tugas yang berisiko mengganggu independensi dan menurunkan kinerja pegawai.

Kata kunci: Sistem pengendalian Internal, Persediaan Obat, Alat Kesehatan

1. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terus meningkat, terutama terkait dengan tuntutan akan layanan kesehatan yang berkualitas (Hanum et al., 2019). Keadaan ini mendorong sektor kesehatan, baik di tingkat pemerintah maupun swasta, untuk terus mengembangkan fasilitas kesehatan yang tidak hanya memadai dari segi infrastruktur, tetapi juga dalam hal ketersediaan sumber daya (Saptowalyono, 2023). Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wilayah-wilayah terpencil di Indonesia yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas (Puspa, 2023).

Fasilitas kesehatan menjadi indikator penting dalam menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama bagi puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Salah satu inovasi penting pada puskesmas terletak pada layanan kefarmasian, yang menjadi aspek utama karena hampir semua layanan yang diberikan kepada pasien berhubungan dengan persediaan obat dan alat kesehatannya (Gaol et al., 2024).

Persediaan menurut PSAP No. 05 merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, serta barang-barang yang disiapkan untuk dijual dan/atau diberikan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat. Persediaan memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kerusakan dan pencurian. Kerusakan barang, pencatatan pemasukan yang tidak akurat, kelalaian dalam mencatat permintaan, serta kesalahan dalam mengeluarkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan dapat menyebabkan

perbedaan antara catatan persediaan dan jumlah persediaan yang sebenarnya ada di gudang (Thian, 2021). Oleh karena itu, dengan tingginya intensitas pergerakan obat, diperlukan verifikasi persediaan secara rutin guna memastikan kesesuaian antara pencatatan dan jumlah fisik yang ada.

Mekanisme yang digunakan untuk mengatasi masalah persediaan tersebut adalah penerapan sistem pengendalian internal (Suseno, 2024). Pengendalian internal atas persediaan dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu untuk melindungi aset perusahaan (persediaan) dari risiko pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta memastikan ketepatan penyajian persediaan dalam laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat diandalkan (Hery, 2024). Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyajikan lima komponen pengendalian internal yang dapat dijadikan acuan untuk penerapan pengendalian internal yang baik dalam operasional pemerintahan. Kelima komponen tersebut yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Puskesmas Sailus yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, merupakan satu-satunya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di Pulau Sailus Besar. Puskesmas ini menyediakan layanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Dengan lokasi yang strategis di tengah pemukiman warga, Puskesmas Sailus mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang berkualitas. Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Sailus memegang peran penting dalam memastikan ketersediaan dan distribusi obat-obatan serta alat kesehatan yang memadai bagi masyarakat pulau.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus terdapat beberapa indikasi bahwa pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus masih menghadapi berbagai masalah. Permasalahan utama pada puskesmas sailus adalah kurangnya beberapa jenis alat kesehatan yang seharusnya tersedia untuk menunjang pelayanan medis. Tidak hanya itu, ketiadaan prosedur yang ketat mengenai akses ke gudang, di mana seluruh karyawan Puskesmas memiliki kebebasan untuk keluar masuk gudang persediaan tanpa adanya kontrol yang memadai. Akibat dari peristiwa ini ini, terdapat persediaan yang hilang atau tidak terlacak dengan benar. Di samping itu, terdapat beberapa kasus di mana obat-obatan yang tersimpan mengalami kedaluwarsa, yang berpotensi merugikan baik dari segi biaya maupun pelayanan. Berikut adalah data kehilangan dan data kedaluwarsa persediaan obat di Puskesmas Sailus.

Tabel 1 Data Persediaan Hilang, dan *Expired* Pada Puskesmas Sailus Pada Tahun 2021 – 2023

Tahun	Saldo Persediaan Per 31 Des (Rp)	Jenis Persediaan <i>Expired</i> (Rp)	Jenis Persediaan Hilang (Rp)
2021	296.672.352	543.900	1.126.433
2022	322.142.373	578.000	980.850
2023	231.425.349	623.000	1.021.594

Sumber: Puskesmas Sailus, 2024

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa jumlah persediaan yang *expired* dan hilang di Puskesmas Sailus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Jumlah persediaan *expired* meningkat secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan stok yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengelola persediaan sebelum kedaluwarsa. Selain itu, jumlah persediaan yang hilang tetap tinggi sepanjang periode tersebut, meskipun sedikit menurun pada tahun terakhir. Kesenjangan ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang diterapkan di Puskesmas Sailus. Dalam teori pengendalian internal, sistem yang baik seharusnya mampu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sebelum masalah tersebut berkembang (Romney & Steinbart, 2021).

Analisis sistem pengendalian internal persediaan obat dan alat kesehatan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Metode penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Firman (2021) yang menganalisis pengendalian internal di Rumah Sakit Nene Mallomo dan penelitian oleh Achmad et al. (2023) yang mengevaluasi Apotek Malomo Farma. Kedua penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam efektivitas pengendalian internal, khususnya pada pemantauan dan pemisahan tugas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muna et al. (2023) di Puskesmas Gampeng menunjukkan bahwa meskipun penerapan sistem pengendalian internal berjalan baik, masih ada kelemahan dalam pencatatan dan pemisahan tugas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian sebelumnya dengan

fokus pada Puskesmas Sailus, dan menggunakan standar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai acuan dalam menganalisis komponen pengendalian internal yang lebih komprehensif.

Berlandaskan analisis terhadap masalah dan fenomena yang diidentifikasi serta temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan (Studi Pada Puskesmas Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memahami sistem pengendalian internal persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan persediaan, serta data sekunder yang mencakup dokumen, laporan, dan catatan terkait dengan pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal atas persediaan. Terhadap variabel tersebut dilakukan pengukuran yang berlandaskan pada lima komponen utama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Aktivitas Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan.

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis terkait persediaan dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk mempertahankan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal terhadap persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus berfungsi secara efektif.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

3.1.1. Lingkungan Pengendalian

Penegakan integritas dan nilai etika

Penerapan integritas dan nilai etika di Puskesmas Sailus telah dijalankan dengan baik melalui adanya standar perilaku pegawai yang tertuang dalam *Standard Operating Procedure* (SOP), khususnya pada bagian gudang farmasi. Sebagaimana SOP tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sailus Nomor: 126/PKM-SLS/TU/I/2023 tentang Pelayanan Kefarmasian. SOP ini menjadi pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Dalam hal penegakan disiplin, apabila terdapat pegawai yang tidak melakukan pencatatan stok dengan benar atau tidak mengikuti prosedur penyimpanan, maka akan diberikan teguran secara lisan.

Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dalam sistem pengendalian internal persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus tercermin melalui berbagai upaya berkelanjutan dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab utama pengelolaan sumber daya manusia, memastikan bahwa apoteker dan asisten apoteker yang bertugas memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi, termasuk memiliki Surat izin praktik yang sah (Lampiran 22). Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan khusus yang diberikan kepada apoteker dan asisten apoteker. Setiap tahunnya, mereka diwajibkan mengikuti seminar pelatihan guna meningkatkan pemahaman terkait pencatatan, manajemen stok, serta prosedur farmasi (Lampiran 23). Pelatihan ini tidak hanya memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan persediaan obat dilakukan secara efektif dan akurat.

Kepemimpinan yang kondusif

Di Puskesmas Sailus tercermin keterlibatan aktif kepala puskesmas dalam mengawasi persediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Dengan *monitoring* stok obat dan pemeriksaan fisik alat kesehatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kepala puskesmas menunjukkan komitmen dalam memastikan ketersediaan yang memadai. Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti adanya peningkatan kasus penyakit atau situasi darurat, pemantauan dilakukan lebih sering untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan

Di Puskesmas Sailus struktur organisasinya telah disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, termasuk dalam mendukung efisiensi pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Struktur ini mencakup berbagai unit dan penanggung jawab yang menangani fungsi-fungsi strategis seperti pelayanan kefarmasian, laboratorium, pengendalian penyakit, hingga manajemen mutu. Penempatan pejabat pada posisi yang relevan memperjelas alur koordinasi, pembagian tugas, dan wewenang setiap individu dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan tantangan dalam efektivitas fungsi organisasi. Salah satu contohnya adalah peran ganda yang dijalankan oleh tenaga kesehatan. Sebagai contoh, Johari Syam, A.Md.Farm yang berprofesi sebagai asisten apoteker, juga merangkap sebagai Koordinator Audit Internal dalam unit Mutu Puskesmas. Perangkapan tugas ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta menurunkan fokus dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Dapat dilihat pada halaman 36.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan obat di Puskesmas sudah berjalan dengan baik dikarenakan sudah sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing. Apoteker pelaksana bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian, termasuk pengelolaan siklus obat dari perencanaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga pencatatan dan laporan, serta distribusi ke berbagai unit layanan kesehatan. Apoteker juga berperan dalam menjamin mutu pelayanan, memberikan informasi obat, melakukan konseling, serta memastikan penggunaan obat yang rasional. Sementara itu, asisten apoteker membantu apoteker dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif, pencatatan, distribusi, pelayanan resep, hingga pengumpulan data pelaporan. Pendelegasian yang tepat ini menciptakan pembagian kerja yang efektif dan akuntabel, meminimalkan risiko kesalahan dalam pencatatan maupun distribusi, serta menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan secara optimal bagi pelayanan kesehatan.

3.1.2. Penilaian Risiko

Puskesmas Sailus melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu risiko kehilangan, risiko kedaluwarsa, dan risiko kekosongan stok.

Risiko Kehilangan

Puskesmas Sailus telah menerapkan sistem pencatatan keluar-masuk obat yang dilakukan oleh petugas farmasi sebagai upaya untuk mengontrol stok yang tersedia. Selain itu, puskesmas juga membuat laporan persediaan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah obat yang ada sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi selisih dalam pencatatan. Langkah ini bertujuan agar persediaan obat tetap terpantau dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan, terutama terkait akses gudang obat yang masih terlalu bebas. Saat ini, semua pegawai dapat masuk ke dalam gudang tanpa adanya pengawasan yang ketat, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan atau penyalahgunaan obat. Ketiadaan sistem kontrol yang memadai semakin memperbesar risiko tersebut, terutama karena belum diterapkan teknologi keamanan seperti kamera pengawas (CCTV) atau sistem pencatatan digital yang lebih akurat. Lemahnya sistem pengawasan ini dapat menghambat efektivitas dalam menjaga keamanan stok obat, sehingga perlu adanya perbaikan dengan penerapan prosedur yang lebih ketat.

Risiko Kedaluwarsa

Puskesmas Sailus telah menerapkan langkah untuk mengelola risiko kedaluwarsa, yakni sistem *First Expired First Out* (FEFO) yang memastikan obat dengan masa kedaluwarsa lebih dekat digunakan lebih dahulu. Untuk

memudahkan petugas dalam mengeluarkan obat, maka setiap dus obat diberi label sesuai lamanya masa kedaluwarsa.

Obat yang memiliki masa *expired* kurang dari 6 bulan maka diberi label merah.

Obat yang memiliki masa *expired* kurang dari 2 tahun – 6 bulan, maka diberi label kuning.

Obat yang memiliki masa *expired* lebih dari 2 tahun diberi label hijau.

Sehingga untuk obat-obatan yang memiliki label merah harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kedaluwarsa.

Risiko Kekosongan *Stock*

Puskesmas Sailus telah melakukan berbagai langkah preventif yang cukup efektif. Puskesmas Sailus telah menetapkan batas minimal setiap jenis obat sebagai acuan dalam melakukan pemesanan ulang. Misalnya, obat paracetamol minimal tersedia dua dus atau sepuluh strip. Pemantauan persediaan dilakukan berdasarkan catatan arus keluar obat yang dicatat secara manual maupun dalam format digital sederhana. Selain itu, petugas farmasi secara rutin melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan obat di gudang. Perencanaan pengadaan juga mengacu pada riwayat pemakaian obat periode sebelumnya untuk mencegah terjadinya kekurangan mendadak, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendukung.

3.1.3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian di Puskesmas Sailus menunjukkan bahwa sistem keamanan dalam penyimpanan obat belum sepenuhnya efektif. Meskipun penguncian lemari penyimpanan telah diterapkan, akses pengambilan stok masih terbuka bagi semua petugas tanpa pembatasan yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan obat. Selain itu, meskipun dilakukan pengecekan silang antara pencatatan stok dan jumlah fisik obat setiap akhir bulan, sistem pengawasan yang ada belum cukup kuat untuk memastikan akurasi dan keandalan pencatatan secara konsisten. Pegawai juga diwajibkan menyusun laporan bulanan dalam bentuk Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), namun belum ada sistem yang terintegrasi dengan baik untuk memudahkan pengawasan secara real-time.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, terdapat masalah pada pemisahan tugas yang menghambat efektivitas organisasi. Salah satu contohnya adalah peran ganda yang dijalankan oleh tenaga kefarmasian. Johari Syam, A.Md.Farm, yang berprofesi sebagai asisten apoteker, juga merangkap sebagai Koordinator Audit Internal dalam unit Mutu Puskesmas. Perangkapan tugas ini mengurangi fokus serta efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing, yang dapat memengaruhi kinerja pengendalian internal secara keseluruhan.

3.1.4. Informasi Dan Komunikasi

Menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk dan media komunikasi.

Puskesmas Sailus menerapkan sistem komunikasi yang terstruktur untuk memastikan koordinasi yang efektif antara tenaga medis, administrasi, dan farmasi dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi rutin untuk membahas kendala operasional serta perencanaan layanan kesehatan. Selain itu, komunikasi harian juga dilakukan melalui media digital seperti aplikasi pesan instan guna mempercepat pertukaran informasi terkait stok obat.

Mengelola, mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara berkelanjutan.

Puskesmas Sailus telah mengadopsi alat komputerisasi dalam pengelolaan stok obat, namun masih mempertahankan pencatatan manual, seperti penggunaan Lembar Register Obat, buku amprahan dari setiap unit layanan (Lampiran 25), kartu stok persediaan obat. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan, pengembangan, serta pembaruan sistem informasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan.

3.1.5. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah diterapkan secara sistematis. Puskesmas Sailus melakukan *stock opname* (Lampiran 26) setiap bulan untuk memastikan kecocokan antara jumlah fisik dan pencatatan administrasi. Pengawasan internal dilakukan melalui pencatatan manual maupun digital setiap kali ada penerimaan dan pengeluaran obat, serta pengecekan stok secara berkala oleh petugas farmasi. Selain itu,

Kepala Puskesmas turut mengawasi ketersediaan obat guna mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang signifikan. Audit eksternal juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep dan Inspektorat Daerah setidaknya satu kali dalam setahun untuk memastikan bahwa pencatatan dan pengelolaan persediaan telah berjalan sesuai prosedur.

3.2. Pembahasan

Bagian pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan hasil analisis yang kemudian dibandingkan dengan teori-teori mengenai sistem pengendalian internal pemerintahan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus adalah sebagai berikut.

3.2.1. Lingkungan Pengendalian

Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Penegakan integritas dan nilai etika merupakan unsur penting dalam pengendalian internal. Hal ini dilakukan dengan menyusun aturan perilaku, memberikan keteladanan oleh pimpinan, menindak pelanggaran secara disiplin, serta mencegah kebijakan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Penegakan integritas dan nilai etika di Puskesmas Sailus terlihat dari upaya pengawasan yang diterapkan untuk memastikan setiap pegawai mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pegawai di bagian gudang farmasi diharapkan dapat bertindak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan stok. Selain itu, teguran lisan yang diberikan kepada pegawai yang tidak mematuhi aturan menunjukkan upaya aktif dalam mempertahankan kedisiplinan dan memastikan prosedur diikuti dengan tepat. Hal ini juga mencerminkan komitmen organisasi untuk mempertahankan lingkungan kerja yang profesional dan etis.

Komitmen Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dalam suatu organisasi berkaitan dengan bagaimana manajemen memastikan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Di Puskesmas Sailus, komitmen ini tercermin dalam program pelatihan rutin yang diwajibkan bagi apoteker dan asisten apoteker. Setiap tahun, mereka mengikuti seminar dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pencatatan persediaan, pengelolaan stok, serta prosedur farmasi. Dengan adanya pembekalan kompetensi yang berkelanjutan, pengelolaan persediaan obat dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif mencakup dukungan terhadap penerapan fungsi-fungsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), interaksi intensif dengan pejabat di tingkat bawah, serta respons positif terhadap pelaporan terkait keuangan dan operasional. Di Puskesmas Sailus, hal ini terlihat dari peran kepala puskesmas dalam memantau persediaan obat-obatan dan alat kesehatan secara berkala. Dengan melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan serta peningkatan frekuensi pengawasan pada situasi tertentu, kepala puskesmas memastikan bahwa ketersediaan obat tetap terjaga. Pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan tanggap terhadap kebutuhan operasional, sehingga mendukung efisiensi pengelolaan persediaan serta meningkatkan kepercayaan staf dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan

Struktur organisasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas operasional suatu lembaga atau perusahaan, termasuk dalam pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap bagian dapat didefinisikan dengan baik. Kondisi di Puskesmas Sailus menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah dirancang dengan sistematis dan mencakup berbagai unit strategis, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan struktural dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini tampak dari adanya pegawai yang merangkap beberapa fungsi penting dalam organisasi. Situasi semacam ini berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas karena fokus dan konsentrasi pegawai terbagi, serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara tepat

Wewenang dan tanggung jawab mencerminkan bagaimana suatu tugas diberikan dan kepada siapa tugas tersebut dibebankan. Setiap individu dalam instansi harus memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan saling berkaitan dengan peran individu lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di Puskesmas Sailus, sistem yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Apoteker dan asisten apoteker memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan obat, mulai dari pencatatan stok, pemesanan, hingga distribusi obat ke pasien atau unit layanan lainnya. Setiap individu yang terlibat telah menjalankan tugasnya dengan kompeten dan penuh tanggung jawab.

3.2.2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi dampak risiko terhadap organisasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam penelitian ini, Puskesmas Sailus telah melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu risiko kehilangan, risiko kedaluwarsa, dan risiko kekosongan stok.

Aspek risiko kehilangan, Puskesmas Sailus telah menerapkan sistem pencatatan keluar-masuk obat yang dilakukan oleh petugas farmasi serta laporan persediaan secara berkala untuk memastikan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan. Untuk risiko kedaluwarsa, Puskesmas Sailus telah menerapkan sistem *First Expired First Out* (FEFO) yang memastikan obat dengan masa kedaluwarsa lebih dekat digunakan lebih dahulu. Setiap dus obat diberi label warna sesuai lamanya masa kedaluwarsa, Sementara itu, risiko kekosongan stok diminimalkan dengan penetapan batas minimal stok dan koordinasi dengan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) untuk memastikan distribusi obat tidak mengalami keterlambatan.

3.2.3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa instruksi dari pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mengurangi risiko yang telah teridentifikasi dalam proses penilaian risiko. Aktivitas pengendalian meliputi pemisahan tanggung jawab, pemberian otoritas yang sesuai untuk setiap transaksi, perlindungan aset serta pencatatan perusahaan, dan pemeriksaan independen terhadap kinerja karyawan. Di Puskesmas Sailus, sebagai bentuk pengendalian pencatatan dan kesesuaian stok, dilakukan mekanisme pengecekan silang setiap akhir bulan guna memastikan akurasi antara catatan stok dan jumlah fisik obat. Selain itu, pegawai juga diwajibkan menyusun laporan bulanan terkait persediaan obat dalam bentuk Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Lemari penyimpanan obat juga telah dikunci sebagai langkah pengamanan. Namun, akses pengambilan stok obat yang masih terbuka bagi semua petugas tanpa pembatasan khusus. Tidak kalah pentingnya, masalah pemisahan tugas juga menjadi tantangan, terutama dalam hal peran ganda yang dimiliki oleh tenaga kefarmasian. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap struktur organisasi dan pembagian tugas untuk mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang lebih optimal.

3.2.4. Informasi Dan Komunikasi

Komunikasi informasi harus dilakukan secara efektif dengan memastikan tersedianya berbagai bentuk dan media komunikasi serta pengelolaan sistem informasi yang berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi harus dikelola, dikembangkan, dan diperbarui secara berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data.

Puskesmas Sailus telah menerapkan komunikasi yang terstruktur melalui rapat koordinasi rutin dan penggunaan media digital seperti *WhatsApp* untuk mempercepat pertukaran informasi terkait stok obat. Dalam pengelolaan sistem informasi, Puskesmas telah menggunakan alat komputerisasi dalam pengelolaan stok obat, meskipun pencatatan manual masih dipertahankan melalui penggunaan buku amprahan dari setiap unit layanan, daftar permintaan obat, dan kartu stok gudang.

3.2.5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengawasan berkelanjutan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Ini dilakukan melalui pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, dan rekonsiliasi. Selain itu, evaluasi terpisah seperti penilaian mandiri, revidu, dan pengujian dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern atau pihak eksternal guna memastikan sistem tetap optimal dan sesuai standar.

Pemantauan sebagai salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dijalankan secara optimal di Puskesmas Sailus. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional dan strategis. Keterlibatan aktif petugas farmasi dalam melakukan pencatatan dan pengecekan stok secara berkala mencerminkan adanya sistem pengendalian yang berjalan konsisten di tingkat pelaksana. Selain itu, partisipasi Kepala Puskesmas dalam memantau ketersediaan obat menunjukkan adanya pengawasan pada level manajerial. Kegiatan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal, yaitu Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah, juga berperan sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik atas kinerja pengendalian yang telah dilakukan. Dengan demikian, pemantauan di Puskesmas Sailus telah memenuhi prinsip-prinsip SPIP, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan persediaan berjalan sesuai prosedur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Puskesmas Sailus telah menunjukkan pengelolaan persediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang cukup baik melalui penerapan SOP, pelatihan rutin tahunan, serta monitoring aktif oleh kepala puskesmas. Struktur organisasi telah disusun sesuai kebutuhan dengan pembagian tugas yang jelas antara apoteker dan asisten apoteker. Risiko operasional diantisipasi melalui sistem pencatatan, pelabelan masa kedaluwarsa, serta pemantauan stok minimum. Komunikasi antarunit dilakukan melalui rapat rutin dan media digital, sementara pemantauan dilakukan melalui pengecekan fisik berkala dan audit eksternal. Meskipun demikian, efektivitas pengendalian internal masih perlu ditingkatkan. Beberapa kelemahan yang ditemukan meliputi akses gudang yang masih terbuka tanpa pembatasan yang memadai, pencatatan stok yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta adanya perangkapan tugas yang berisiko mengganggu independensi dan menurunkan kinerja pegawai. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas persediaan obat-obatan dan alat kesehatan di Puskesmas Sailus belum sepenuhnya efektif, terutama pada aspek aktivitas pengendalian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan temuan penelitian ini, Puskesmas Sailus disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan memperbaiki struktur organisasi dan menghindari perangkapan jabatan. Selain itu, perlu diterapkan pembatasan akses ke gudang farmasi agar hanya petugas yang berwenang yang dapat mengambil obat. Terakhir, perlu dilakukan digitalisasi sistem pencatatan persediaan obat guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kemudahan dalam pemantauan stok.

Referensi

1. Achmad, A. A., Anwar, A., & Azis, F. (2023). Analisis Pengendalian Internal atas Persediaan Obat dan Alat Kesehatan pada Apotek Malomo Farma. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 6(2), 30–38. <https://doi.org/10.37888/bjra.v6i2.447>
2. Afiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
3. Ali, I. H., Batmomolin, A., Olii, N., Alow, G. B. H., Nurbaiti, Tangka, J., Aruwiyantoko, A., Kawatu, Y. T., Indriani, R., Karwiti, W., Maramis, J. L., Setiawan, B., Yauri, I., Imbar, H. S., Banne, Y., & Raule, J. H. (2024). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: Media Pustaka Indo.
4. Arodhiskara, Y., Lubis, I. T., Damis, S., Abdillah, M. A., Darmawan, Fiddin, F., Safarida, N., Damayanti, F., Purtanto, Fauzi, A., Santoso, R., Tarawiru, Y., Hasanah, N., Nurwani, & Arham. (2023). *Akuntansi Keuangan Daerah: Pendekatan Berbasis Akrual*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
5. Azmi, M. U., Sahade, & Idris, H. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Habis Pakai Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Sulawesi Selatan. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 6(2), 1–20. <https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
6. Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Sari, K., Nabella, R. S., Zabnabil, A., & Radeetha. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
7. COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework: Executive Summary*, Durham. North California.
8. Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
9. Farhan, A. (2022). *Tinjauan atas Akuntansi Persediaan Obat pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Tahun 2020*. Skripsi. Politeknik Keuangan Negara STAN. <http://eprints.pknstan.ac.id/406/>
10. Firman, F. F. (2021). *Analisis Pengendalian Internal Sistem Persediaan Obat Pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi Program Sarjana. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. (tidak diterbitkan).
11. Gaol, R. L., Siboro, D. T., & Hutapea, H. D. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Persediaan Obat (Studi Kasus di Puskesmas Teluk Sentosa Kecamatan Pantai Hulu). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23744>
12. Hanum, N. A., Wijaya, D., & Indrawati, L. (2019). Level of Patient Satisfaction in the Dental Polyclinic of Puskesmas Merdeka Palembang. *Jurnal Kesehatan Gigi*, 6(2), 104–108. <https://doi.org/10.31983/jkg.v6i2.5485>
13. Hartoto, Tatmimah, I., Endraria, Muzayyanah, Sriyani, Djasuli, M., Rahmawati, I., Lestari, H. D., Dewi, M. S., Setyagustina, K., Nurdialy, M., Fitri, S. A., & Ardhiarisca, O. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
14. Haryanto, & Arifuddin. (2018). *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Semarang: Undip Press.
15. Hery. (2023). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
16. Hery. (2024). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: Bumi Aksara.

17. Hurit, H. E., Bimmaharyanto S, D. E., Yanti, N. K. W., Tusshaleha, L. A., Wiputri, O. I., Utami, E. F., Kresnamurti, A., Atikah, N., & Hardani. (2023). *Buku Ajar Farmasi Rumah Sakir*. Yogyakarta: Samudera Biru.
18. Karunia, R. L., & Mabrur, A. (2022). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
19. Lubis, R. H., & Dewi, R. S. (2020). *Pemeriksaan Akuntansi 1 (Auditing 1)*. Jakarta: Prenada Media.
20. Megawati, M., & Rochman, C. (2020). Analisis Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana pada Sekolah Menengah Pertama di Bekasi. *AI-TA DIB*, 12(2), 240. <https://doi.org/10.31332/atdbwv12i2.1277>
21. Muna, Z. L., Noermaning, P., & Selviasari, R. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Obat Di Puskesmas Gampeng Kabupaten Kediri. *Student Research Journal*, 1(3), 252–259. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.336>
22. Nurhidayah, A., Setianingsih, L. Z., Werdani, K. E., Mulyaningrum, F. M., Stellata, A. G., Enisah, Suswardany, D. L., Susanto, A., Rohani, T., & Andari, I. D. (2023). *Manajemen Puskesmas: Konsep, Praktik, Dan Inovasi*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
25. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). PSAP No. 05 Tentang Akuntansi Persediaan.
26. Prasetia, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UmsuPress.
27. Purnamasari, D., Tahir, R., Ismail, I. H., Suharman, H., Maryanti, L., Hermawan, M. S., Andriana, N., Putuhena, H., Silviana, S., Fitriana, R., Christina, V., Tresnawati, R., & Waty, E. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi : Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
28. Purwaji, A., Wibowo, & Lastanti, H. S. (2023). *Pengantar Akuntansi 2* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
29. Puspa, A. (2023, November 14). *Daerah Terpencil Minim Fasilitas Kesehatan Memadai*. Media Indonesia. Dipetik 18 November 2024, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/629528/daerah-terpencil-minim-fasilitas-kesehatan-memadai>
30. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2021). *Accounting Information Systems*. United Kingdom: Pearson.
31. Saptowalyono, C. A. (2023, August 10). *Tuntutan Layanan Kesehatan Kian Tinggi, Wapres: Tingkatkan Mutu Tenaga Kesehatan*. Dipetik 18 November 2024, dari <https://www.kompas.id/Baca/Humaniora/2023/08/10/TuntutanLayanan-Kesehatan-Kian-Tinggi-Wapres-Tingkatkan-Mutu-Tenaga-Kesehatan>.
32. Slamet, K., & Sukoasih, H. (2023). *Manajemen Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Bumi Karsa.
33. Suseno. (2024). *Analisis Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Indomarco Prismatama Indomaret Area Simpang Pusri Palembang*. Skripsi. Universitas Tridnanti. <http://repository.univ-tridnanti.ac.id/8440/>
34. Suwanda, D., Agustina, I., & Primastuti, A. (2023). *Praktikum Pengendalian Internal Modul 1*. Bandung: CV Cendekia Press.
35. Thian, A. (2021). *Dasar-dasar Auditing, Integrated and Comprehensive Edition*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
36. Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2021). *Pengantar Akuntansi 1 - Adaptasi Indonesia* (4th ed.). Jakarta: Salemba.